

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntan *Online*. 2013. "Opini LKPD Kota Magelang Tahun 2011". *Akuntan Online*, 2 April 2013. Diakses tanggal 25 November 2016.  
<http://www.akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=392&t=Payah,%20Pengelolaan%20Administrasi%20Keuangan%20Daerah%20&kat=Akuntansi>.
- Ariyanti. 2016. Wawancara oleh Suci Nasehati. 16 November.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2016*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kota Magelang Tahun 2015*. (Tidak Dipublikasikan)
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang. 2016. "Kartu Inventaris Barang Bagian Perlengkapan Setda". (Tidak Dipublikasikan)
- Chrisnandi, Yuddy. 2016. "Menpan RB: Opini WTP dari BPK Bukan Prestasi". *Antaraneews.com*, 19 Januari 2016. Diakses tanggal 24 November 2016.  
<http://www.antaraneews.com/berita/540838/menpan-rb-opini-wtp-dari-bpk-bukan-prestasi>.
- Dinas Pendidikan Kota Magelang. 2016. "Kartu Inventaris Barang Dinas Pendidikan". (Tidak Dipublikasikan)
- Halim, Abdul. 2015. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Hartono, Jogiyanto. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermawan, Rudy Tri. 2015. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap". *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: FEB UGM.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG
- Magelangkota. 2017. "Pemkot Magelang Raih Opini WTP dari BPK RI". *Magelangkota*, 7 Juni 2017. Diakses tanggal 8 Juni 2017.  
<http://www.magelangkota.go.id/read/page/siaran-pers/2017/06/07/204458/pemkot-magelang-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri>.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mustika, Rasyidah. 2012. “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang”. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: FEB UGM.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah (LKMPD).
- Simamora, R. dan Halim, Abdul. 2012. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 10 Nomor 01.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, HB. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Tama, Putu Ghea Permana. 2015. “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Gianyar”. *Tesis* (Tidak Dipublikasikan). Yogyakarta: FEB UGM.

Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia.